



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARRY RONALDI MAHAPUTRAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 152028

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.807.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/300 m2 di PONTIANAK, WARISAN Rp. 1.018.000.000
2. Tanah Seluas 190 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 372 m2/120 m2 di KUBU RAYA, WARISAN Rp. 257.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 494 m2/120 m2 di KUBU RAYA, WARISAN Rp. 257.500.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
6. Tanah Seluas 1984 m2 di MEMPAWAH, WARISAN Rp. 104.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 120.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 88.300.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 47.392.352

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.063.692.352

III. HUTANG

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.063.692.352

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.